

Konfigurasi Kontekstual Ujaran Kontroversial *Tampang Boyolali*: Analisis Linguistik Forensik Pada Pidato Prabowo Subiyanto

Ardik Ardianto *

Universitas Terbuka

* ardik@ecampus.ut.ac.id;

Abstrak

Penafsiran terhadap bahasa, baik itu berupa ujaran lisan ataupun tulisan, selalu beragam dan berbeda-beda; dan karenanya tak jarang distorsi, mispersepsi, dan misinterpretasi muncul di dalam ruang keberagaman tersebut. Salah satunya yang masih membekas dalam benak kita akhir-akhir ini adalah polemik yang terjadi di ruang publik karena ujaran kontroversial *tampang Boyolali*. Ujaran ini disampaikan oleh Prabowo di sela-sela narasi pidatonya yang ia sampaikan di atas mimbar kampanye politik di Kota Boyolali. Melalui dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan semantik dan pragmatik dalam bentuk konfigurasi kontekstual, penelitian ini bertujuan menelisik: 1) makna semantis dan pragmatis dari ujaran tampang Boyolali yang disampaikan dalam pidato; 2) fungsi konfigurasi kontekstual ujaran tersebut; dan 3) mendudukan fungsi tersebut terhadap pasal delik aduan yang dijeratkan. Hasil temuan menunjukkan bahwa 1) ujaran kontroversial *tampang Boyolali* tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau menghinakan kehormatan penduduk Boyolali pada umumnya; 2) ujaran tersebut dimaksudkan sebagai sarana humor (*jokes*) untuk menciptakan ruang interaksi antara Prabowo dan seluruh audiensi; dan 3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak memenuhi syarat untuk menjerat ujaran kontroversial tersebut. Meski demikian, sebagai seorang tokoh politik, figur masyarakat, sekaligus orator yang handal, Prabowo seharusnya mampu menangkap konsekuensi-konsekuensi yang akan muncul ketika menggunakan diksi-diksi yang mudah sekali diasosiasikan dengan SARA, sehingga bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan diksi atau register di setiap narasi pidatonya.

Kata Kunci: konfigurasi kontekstual, pragmatik, semantik, tampang Boyolali

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari aktivitas manusia. Melalui bahasa, pemikiran, gagasan, dan informasi dapat tersampaikan. Pada tataran inilah, banyak ahli menyampaikan bahwa bahasa dari segi fungsi dan penggunaannya merupakan suatu sarana berkomunikasi antara satu manusia dengan manusia yang lain (Kramsch & Widdowson, 1998, p. 3; Yule, 2020, p. 12). Sarana berkomunikasi di sini tentunya tidak hanya melibatkan unsur kebahasaan saja; lebih jauh,

bagaimana hubungan antara bahasa sebagai sarana penyampaian dan budaya sebagai muatan pesan yang ingin disampaikan saling berkelindan di dalam suatu peristiwa komunikasi. Dalam berkomunikasi, bahasa yang digunakan oleh seseorang sedikit banyak mampu mencerminkan, dan menyimbolkan realitas budayanya (Ibid.). Dan salah satu unsur budaya yang tercermin dari proses komunikasi ini adalah unsur identitas sosial—bagaimana seseorang dengan identitas sosial yang berbeda tentunya akan mencerminkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda pula (Halliday & Hasan, 1989, p. 29).

Hubungan antara konteks bahasa secara luas (baca: wacana) dan identitas sosial ini terbilang cukup kompleks, terlebih ketika arus perkembangan teknologi semakin pesat seperti sekarang ini. Dengan munculnya fenomena dunia virtual—yang sering kita sebut sebagai internet atau dunia maya—identitas yang melekat pada diri seseorang menjadi semakin kompleks dan berlapis-lapis; dan oleh karenanya, sebagai akibat domino dari fenomena ini, hubungan antara praktik berbahasa dan identitas seseorang semakin kompleks pula—ambil contoh seperti pada kasus identitas buatan (anonim) yang sering sekali mengecoh interaksi di dunia maya (Paltridge, 2012, p. 25). Di samping identitas artifisial yang semakin marak terjadi di dunia maya, konten pesan atau unsur kebahasaan yang disampaikan sering pula mengalami distorsi, seperti yang mafhum terjadi belakangan ini di mana sebahagian ujaran dari suatu wacana yang disampaikan oleh seseorang atau sekelompok orang sering didistorsi secara sengaja untuk menciptakan mispersepsi baru di ruang publik dengan tujuan untuk menurunkan, merendahkan, bahkan merugikan salah satu pihak.

Fenomena distorsi semacam ini mudah sekali terjadi karena akhir-akhir ini hubungan antara unsur kebahasaan semakin dilepaskan dari atribut dependensinya terhadap konteks situasi, sosial, politik, serta budaya yang melingkupinya—terlebih ketika era post-strukturalisme mengambil tempat¹. Dengan menganggap bahasa sebagai sesuatu yang independen, maka saat itu juga pemaknaan terhadapnya akan selalu bias dan mudah sekali disalahgunakan. Padahal, bahasa bukanlah suatu fakta sosial yang keluar dari ruang kehampaan; sebaliknya, ia selalu muncul dan tumbuh sebagai suatu nilai pemaknaan akan berbagai unsur yang melingkupinya, misalnya saja konteks situasi di mana bahasa tersebut digunakan.

Distorsi atas informasi dan pemaknaan suatu fenomena kebahasaan sering dijumpai dalam kasus-kasus hukum beberapa tahun terakhir ini, mulai dari penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, dsb. Mengingat semakin mudahnya konten informasi (baik berupa rekaman suara, video, bahkan kutipan percakapan) didapatkan dan disebarluaskan di ruang publik melalui berbagai kanal media sosial, maka semakin mudah pula proses distorsi dan manipulasi terjadi—terlebih ketika tingkat literasi masyarakat masih terbilang cukup rendah untuk menerima, menyaring, dan memproses kebenaran informasi tersebut secara kritis (Suhandano, 2017, pp. 21–22). Maka tak mengherankan jika sekarang hubungan antara bahasa dan hukum mulai menjadi perhatian utama, apalagi setelah terjadinya kasus penistaan agama yang menjerat mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di tahun 2016.

Hampir sama dengan delik aduan yang dilayangkan kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, akhir-akhir ini muncul berbagai gelombang protes yang melibatkan sejumlah massa, penduduk Boyolali, atas ujaran Prabowo Subiyanto, salah satu kandidat calon presiden pada Pemilu 2019 yang disinyalir menyinggung kehormatan penduduk Boyolali. Atas ujaran *tampang Boyolali* tersebut, Prabowo disangkakan dengan pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tentang ITE dan atau pasal 4 huruf b angka 2 juncto pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau pasal 156 KUHP. Untuk menelisik lebih lanjut terkait ujaran kontroversial *tampang Boyolali* tersebut, maka penelitian dengan pendekatan linguistik forensik sangat penting untuk dilakukan.

Istilah linguistik forensik sudah lama dikenal oleh para pakar, khususnya pakar-pakar di bidang linguistik. Namun, bidang dan aspek cakupan linguistik forensik ini masih diperdebatkan hingga saat ini—hal ini meliputi pembahasan terkait jenis teks apa saja yang dapat digunakan, pendekatan seperti apa yang masuk di dalamnya sehingga membedakannya dengan sub-disiplin linguistik lain, sejauh mana unsur kebahasaan dapat diklaim sebagai bukti hukum positif di depan proses pengadilan, dan lain sebagainya. Betapa pun, ada satu poin utama yang disepakati para ahli terkait disiplin ilmu linguistik forensik ini, yakni bahwa ia merupakan sub-bagian dari ilmu linguistik terapan yang digunakan dalam konteks hukum legal, baik kaitannya dengan bahasa di dalam proses persidangan maupun dengan bahasa sebagai bukti hukum positif di depan persidangan (Coulthard et al., 2017, p. 4; McMenamin & Choi, 2002, pp. 79–82; Olsson & Luchjenbroers, 2014, pp. 3–4). Karena merupakan salah satu pengejawantahan ilmu linguistik terapan, maka linguistik forensik ini tentunya menggunakan paradigma, cara pandang, pendekatan, dan metode-metode linguistik dalam penerapannya—misalnya penggunaan analisis linguistik mikro (fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantis) serta analisis linguistik makro (pragmatis, kontekstual, dan wacana).

Ada beberapa penelitian terkait linguistik forensik yang memiliki unsur yang relatif sama dengan kasus ujaran kontroversial *tampang Boyolali* ini, seperti pada kasus ujaran kontroversial artis Zaskia Gotik (Budiawan & Mualafina, 2016), penggunaan kata tabu, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik dalam media sosial (Halid, 2022; Mintowati, 2016; Rahman, 2019) serta kasus ujaran penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dari beberapa kasus ini, yang menarik adalah bahwa kedua kasus, yakni kasus Zaskia Gotik dan kasus Ahok, dianalisis dari unsur kontekstualitas ujarannya. Meski demikian, pelibatan unsur konteks ini menghasilkan putusan yang sangat berbeda pada keduanya; yang pertama dinyatakan tidak memenuhi unsur penghinaan terhadap lambang negara sebagaimana termuat pada pasal yang didakwakan sedangkan kasus yang kedua justru memperkuat argumentasi pemenuhan unsur penistaan agama. Budiawan & Mualafina (2016) memerikan bagaimana konteks tuturan mengambil peran yang sangat penting untuk melihat apakah ujaran kontroversial yang diucapkan artis Zaskia Gotik bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap lambang negara. Dengan mempertimbangkan unsur intensionalitas dan gaya implikatur humoris Zaskia Gotik, dakwaan penghinaan terhadap lambang negara

sebagaimana dilayangkan kepadanya tidak memiliki cukup bukti untuk memenuhi unsur pidana.

Sebaliknya pada kasus kedua, unsur konteks (situasi di sekitar ujaran) menjadi argumentasi penguat bahwa ujaran yang diucapkan oleh Ahok terbukti telah memenuhi unsur pidana terkait penistaan agama; dan karenanya, Mahkamah Agung memberikan vonis pidana selama 2 tahun masa kurungan karena ujaran tersebut. Jika hanya dilihat dari unsur kebakasaannya semata (dalam hal ini berarti makna semantisnya tanpa melibatkan konteks tuturannya) maka ujaran “...*jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51 macam-macam gitu lho*” (dikutip dari Edunews.id, 14 Oktober 2016) akan menjadi sangat ambigu mengingat verba *dibohongi* merupakan verba intransitif yang mensyaratkan dua argumen, yakni pelaku (orang yang membohongi) dan penderita (orang yang dibohongi). Namun, kedua argumen tersebut tidak mungkin bisa ditemukan secara eksplisit dalam ujaran tersebut (Suhandano, 2017, p. 26). Oleh karena itu, dalam tataran ini unsur kontekstualitas yang dikaji melalui sudut pandang pragmatis mengisi ruang kosong argumentasi yang tidak dapat ditemukan pada unsur internal kebahasaan.

Dengan mempertimbangkan kedua kasus tersebut, maka sangat penting kiranya untuk menelaah ujaran kontroversial *tampang Boyolali* yang diucapkan Prabowo di salah satu bagian wacana pidato kampanyenya di kota Boyolali. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan sekaligus dalam menelisik kasus ujaran tersebut, yakni melalui pendekatan struktur mikro tekstualitasnya (dalam hal ini berarti makna semantisnya) dan pendekatan struktur makro melalui konfigurasi kontekstual (dalam hal ini berarti kerangka konseptual tentang konteks situasi: *field*, *mode*, dan *tenor*). Diharapkan dengan menggunakan kedua pendekatan ini—khususnya dengan penitikberatan pada unsur konfigurasi kontekstual—temuan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi nyata, baik dalam ranah teoretis maupun praktis, sebagai referensi keilmuan lintas disipliner, khususnya dalam bidang kebahasaan dan hukum. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan rujukan kebahasaan bagi lembaga hukum ketika menangani suatu perkara kebahasaan guna mendapatkan gambaran yang utuh sebelum memberikan putusan.

Konfigurasi Kontekstual: Suatu Konsep Konteks Situasi

Dalam linguistik makro (faktor luar kebahasaan), suatu ujaran tidak bisa alpa dari faktor-faktor situasi atau lingkungan yang melingkupinya—meminjam istilah Malinowski, faktor ini disebut dengan ‘konteks situasi’ (Halliday & Hasan, 1989, p. 6). Namun memang, dalam tahap awal perkembangannya, teori konteks situasi ini masih bias dalam mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Beberapa pakar, seperti Firth (pakar linguistik) mengembangkan teori ini dengan melibatkan empat unsur di dalamnya: partisipan, tindakan, unsur lingkungan lain yang relevan, dan pengaruhnya (Ibid., p. 8; Léon, 2007, p. 6) sedangkan Hymes (pakar komunikasi) memberikan delapan unsur: bentuk dan isi pesan, latar, partisipan, maksud dan pengaruh, unsur kunci, perantara, genre, dan norma interaksi (Halliday & Hasan,

1989, p. 9). Tujuan utama penggunaan konteks situasi ini adalah menguak lebih dalam pemaknaan yang dapat ditafsirkan dari suatu ujaran, baik berupa kata pada tataran yang paling sempit hingga wacana pada tataran yang paling luas, dengan melibatkan unsur-unsur yang tidak dapat ditemukan dalam unsur internal kebahasaan.

Halliday (1989) pada salah satu bagian dalam bukunya *Language, Context, and Text* memformulasikan konsep ‘konteks situasi’ ini ke dalam tiga komponen utama, yakni *field*, *tenor*, dan *mode*.

- *Field*, merupakan komponen pertama yang digunakan Halliday untuk menjelaskan bahwa suatu wacana dapat dijelaskan secara mendalam dengan melibatkan *fungsi meta kebahasaan ideasional* yang meliputi dua unsur makna: makna eksperiensial dan makna logis. Keduanya dapat terejawantahkan menjadi pembahasan, isi atau poin utama mengapa suatu wacana diproduksi.
- *Tenor*, merupakan komponen kedua yang melibatkan *fungsi meta kebahasaan interpersonal*. Hal ini meliputi unsur-unsur yang relevan kaitannya dengan makna interpersonal; seperti misalnya, unsur siapa yang terlibat dalam wacana tersebut, peran seperti apa yang disandang oleh para partisipan wacana, serta bagaimana hubungan peran tersebut terjalin.
- *Mode*, merupakan komponen terakhir yang melibatkan *fungsi meta kebahasaan tekstual*. Komponen terakhir ini mendekati suatu wacana dari sudut pandang pemaknaan tekstualitas. Dalam tahap ini, bentuk ekspresi kebahasaan menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan—apakah wacana tersebut disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan, bagaimana proses penyampaian, serta bagaimana struktur redaksinya dibentuk atau dibangun.

Dengan merajut ketiga fungsi meta kebahasaan ini (ideasional, interpersonal, dan tekstual) menjadi suatu unsur kesatuan (konfigurasi kontekstual), pemaknaan terhadap ujaran kontroversial *tampang Boyolali* pada penelitian ini diharapkan lebih utuh dan mendalam—sehingga terhindar dari penafsiran yang bias dan sepihak. Penempatan konfigurasi kontekstual ini dirasa penting mengingat ujaran kontroversial tersebut diproduksi dalam suatu keadaan atau situasi yang sarat akan proses pergulatan, baik pergulatan identitas, sosial, politik, bahkan ideologi; terlebih karena wacana tersebut disampaikan oleh salah satu kandidat calon presiden di atas mimbar kampanye politik.

Metode

Penelitian ini menggunakan sumber data utama berupa teks pidato lengkap Prabowo Subiyanto ketika berkampanye di Kota Boyolali. Transkripsi lengkap pidato didapatkan dari Harian Digital Tempo tertanggal 4 November 2018 dengan judul “Pidato Lengkap Prabowo soal Tampang Boyolali dan Masalah Ekonomi”. Teks pidato tersebut kemudian ditelaah secara

kritis melalui unsur semantis dan pragmatis. Unsur semantis (Sugono et al., 2008) ditujukan untuk mendudukan ujaran kontroversial tampang *Boyolali* dari segi internal kebahasaannya—terkait bagaimana ujaran tersebut mampu menimbulkan berbagai penafsiran jamak. Sedangkan unsur pragmatis, dalam bentuk kajian kontekstual konfigurasi, ditujukan untuk melihat hubungan antara ujaran di satu sisi dan konteks situasi yang melingkupi di sisi lain guna melihat tingkat intensionalitasnya, tujuan diucapkannya, serta implikasi yang dimaksudkan, sehingga didapatkan pemahaman yang utuh dan proporsi. Data disajikan dalam bentuk pemerian deskriptif berdasarkan urutan kedua unsur tersebut; pertama-tama disajikan dari sudut pandang makna semantisnya yang kemudian ditelisik lebih dalam dari sudut pandang konfigurasi kontekstualnya.

Hasil dan Pembahasan

Pemaknaan Semantis Ujaran Kontroversial Tampang Boyolali

Sebelum memasuki penjabaran lebih dalam terkait pemaknaan semantis ini, perlu kiranya disajikan kutipan penuh ujaran kontroversial yang diucapkan Prabowo Subiyanto dalam pidato kampanye di Kota Boyolali. Berikut redaksi kutipan tersebut:

Tetapi begitu saya keliling Jakarta saya lihat gedung-gedung mewah, gedung-gedung menjulang tinggi, hotel-hotel mewah, sebut saja hotel mana di dunia yang paling mahal ada di Jakarta. Ada Ritz-Carlton, ada apa itu, Waldoft Astoria. Namanya saja kalian nggak bisa sebut. Dan macam-macam itu semua, tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Kalian kalau masuk mungkin kalian diusir, **tampang** kalian **tampang** tidak orang kaya, **tampang** kalian, **tampang Boyolali**, ini, betul.

Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa kata *tampang* muncul sebanyak empat kali di mana antara satu kata dengan kata yang lain merupakan suatu kesatuan entitas yang sama. Dalam konteks semantis, apabila diterjemahkan secara harfiah, kata *tampang* ini merupakan kata nomina yang berarti rupa muka atau bentuk muka (Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia). Namun memang, meskipun bersinonim dengan muka atau wajah, diksi *tampang* ini sedikit banyak mengalami unsur peyoratif dalam kolokasi penggunaannya—mengingat diksi *tampang* ini cenderung diasosiasikan dengan sesuatu yang berkonotasi negatif seperti misalnya pada frasa *tampang preman*, *tampang kriminal*, dsb. Namun, argumentasi dibalik pemaknaan harfiah ini tentunya belum bisa disebut sebagai suatu tindakan merendahkan atau menghinakan seseorang atau salah satu pihak, mempertimbangkan bahwa dalam penggunaannya kata *tampang* dan *muka* atau *wajah* tetap bisa digunakan silih bergantian. Meski demikian, jika kita merujuk kembali pada redaksi kutipannya, unsur kohesi antara keempat diksi *tampang* ini saling menguatkan satu sama lain. Alih-alih berbicara *tampang* secara umum, penegasan kata *tampang* pada kedua, ketiga, dan keempat kalinya ini dapat ditafsirkan bahwa *tampang* yang dimaksud oleh Prabowo adalah tampang seluruh audiensi yang hadir ketika pidato tersebut disampaikan. Lebih lanjut, dengan menggunakan frasa komplemen *tidak orang kaya* pada pengulangan kedua dan kata *Boyolali* pada pengulangan keempat, seolah-olah Prabowo mengasosiasikan dua proposisi atau premis, yakni premis

pertama *tampang kalian tampang tidak orang kaya* dan premis kedua *tampang kalian tampang Boyolali*. Dan dari kedua jenis proposisi atau premis ini dapat diimplikasikan bahwa apa-apa yang merupakan tampang Boyolali pasti merupakan tampang tidak orang kaya.

Dari hubungan asosiasi semacam ini tentunya tidak sulit bagi siapa saja pendengarnya untuk sampai pada kesimpulan bahwa *tampang Boyolali* yang diujarkan Prabowo memiliki asosiasi makna konotatif negatif, bahwa tampang Boyolali selalu identik dengan tampang tidak orang kaya. Argumentasi ini juga didukung dengan banyak sekali penggunaan kata pronomina *kalian* (yang sekali lagi mengarah pada seluruh audiensi ketika pidato tersebut disampaikan) seperti pada klausa *saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut—hotel yang menurut pendapat Prabowo merupakan hotel termahal di dunia yang berlokasi di Jakarta, seperti hotel Ritz-Carlton, Waldorf Astoria*. Bahkan, pada kalimat selanjutnya, Prabowo melanjutkan bahwa para audiensi tidak dapat menyebutkan namanya. Dengan melihat lebih saksama proposisi-proposisi tersebut, atribut yang disandangkan pada premis *tampang Boyolali* ini semakin bertambah; bahwa *tampang Boyolali* dapat diartikan memiliki beberapa asosiasi seperti: (1) *tampang tidak orang kaya*; (2) *tampang tidak pernah masuk hotel-hotel paling mahal*; serta (3) *tampang yang bahkan tidak mampu menyebutkan nama hotel-hotel tersebut dengan benar*.

Maka tak heran ketika kutipan ini dilepaskan dari konteksnya, dipotong dari bagian lain dari keseluruhan pidatonya, pemaknaan yang muncul di ruang publik cenderung negatif, merendahkan kehormatan orang Boyolali secara umum; dan karenanya sangat masuk akal ketika seseorang melaporkan ujaran ini. Tapi apakah cukup untuk menafsirkan ujaran tersebut hanya dari satu kacamata, yakni kacamata semantis saja? Tentu tidak, karena sebagaimana disebutkan di muka bahwa konfigurasi kontekstual yang menyelimuti ujaran inilah yang mampu mengantarkan kita pada pemahaman yang lebih utuh; tidak parsial. Guna keperluan itu, maka dirasa penting untuk menyuguhkan perspektif kedua ini di bagian selanjutnya.

Konfigurasi Kontekstual Ujaran Kontroversial Tampang Boyolali

Untuk mengawali pembahasan pada bagian ini, penting kiranya untuk menelisik kembali identitas sosial-politik partisipan (pihak-pihak) yang terlibat di sekitar wacana pidato kampanye tersebut; pertama, terkait sang komunikator Prabowo Subiyanto, dan kedua, terkait audiensi. Sebagaimana diketahui bahwa pidato ini disampaikan oleh Prabowo Subiyanto sebagai sosok politik (ketua umum Partai Politik Gerakan Indonesia Raya atau lazim dikenal Gerindra, kandidat calon presiden di ajang kontestasi pemilu 2019). Oleh karena itu, sudah seharusnya penafsiran atas wacana pidato ini diarahkan ke ranah politik; dan karenanya secara otomatis segala jenis argumentasi di dalamnya harus dimaknai sebagai upaya untuk membentuk, membangun, dan memperkuat citra Prabowo di mata para kadernya—yang berarti unsur *ethos* dan *pathos* meminjam istilah retorikanya Aristoteles² (Luhukay, 2007, p. 60; Murthy & Ghosal, 2014). Di samping itu, pidato ini disampaikan kepada seluruh kader partai politik Gerindra di salah satu pos tim kampanye kemenangan pemilu 2019. Maka

dengan sendirinya hal ini menyiratkan bahwa apa pun argumentasi yang disampaikan dalam pidato tersebut sudah barang tentu akan diterima dan disambut dengan baik oleh para audiensi. Untuk menelaah secara kritis bangunan wacana dalam pidato tersebut, digunakan tiga komponen utama dari konfigurasi kontekstual, yakni *field*, *tenor*, dan *mode*.

Field

Pidato ini memiliki beberapa konstruksi rasionalitas yang menjadi pembahasan utama di dalamnya; pertama, terkait tim koalisi pengusung kandidat calon presiden dan wakil presiden nomor 2, yakni Prabowo-Sandi, yang dibentuk oleh empat partai besar—Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra; dua, terkait dukungan dari luar selain keempat partai tersebut; ketiga, terkait rasionalitas dibalik penamaan tim koalisi adil makmur; keempat, terkait cerita perjuangan masa lalu yang telah dialami Prabowo dan mantan Gubernur Jawa Tengah Letjen (Purn.) H. Bibit Waluyo; kelima, terkait disparitas ekonomi yang terjadi di Indonesia—dan pada bagian inilah kasus ujaran kontroversial *tampang Boyolali* terjadi; dan terakhir keenam, terkait komitmen para partai apabila nanti terpilih dalam kontestasi pemilu 2019.

Keenam konstruksi rasionalitas ini disampaikan dalam konteks yang lugas, mudah dipahami, dan bersifat persuasif. Dalam beberapa bagian, terlihat bahwa konstruksi kalimat yang terbangun terkadang berupa deklaratif informatif namun tak jarang pula penggunaan kalimat interogatif interpersonal guna menjalin kedekatan kepada para audiensi. Kalimat-kalimat deklaratif digunakan sebagai landasan dalam membentuk dan membangun keyakinan kepada para audiensi, misalnya ketika meyakinkan para audiensi bahwa keempat partai pendukung koalisi merupakan partai yang dapat dikatakan memiliki rekam jejak yang kredibel dan berintegritas. Sedangkan kalimat-kalimat interogatif interpersonal digunakan dengan maksud menciptakan suasana hangat, ramah, dan interaktif antara Prabowo sebagai seorang komunikator dan para audiensinya. Hal ini terlihat pada beberapa kesempatan Prabowo melayangkan pertanyaan retorik dalam bentuk kalimat tanya *betul saudara-saudara, betul?* yang kemudian disambut dengan balasan singkat dalam bentuk pembenaran dari para audiensi. Dan yang terpenting dari semuanya adalah bahwa terlepas dari apa pun argumentasi yang terbentuk di dalam narasi pidato tersebut, tujuan utamanya tetap terletak pada unsur persuasif seorang tokoh politik di hadapan para pendukungnya. Jadi, sangat tidak mungkin di dalam penyampaian wacana tersebut ada unsur merendahkan bahkan menghina audiensi—meskipun dalam realitasnya, penafsiran yang berkembang di luar forum tersebut telah berbeda sama sekali dengan yang dikehendaki atau yang dimaksudkan.

Tenor

Sebagaimana disebutkan di awal bagian pembahasan ini, wacana pidato ini dibangun di atas dua pihak, yakni Prabowo sebagai sang komunikator dan para audiensi yang merupakan tim sukses pemenangan pemilu dan kader-kader partai Gerindra. Narasi wacana disampaikan secara otoritatif dari atas ke bawah; dari Prabowo sebagai ketua umum sekaligus kandidat

calon presiden 2019 kepada para kader partainya. Penggunaan pronomina *kita, kita sekalian*, dan *saudara-saudara* menunjukkan aspek interaksional kepada para audiensi guna membangun citra kedekatan dan keakraban (Wisudariani, 2014). Argumentasi yang dibangun bukan semata-mata hanya melibatkan Prabowo saja tetapi juga melibatkan kepentingan bersama. Hal ini penting ditekankan karena sekali lagi bahwa wacana ini merupakan wacana politik massa dengan tujuan membangun citra dan simpati sekaligus menguatkan ideologi di antara ketua partai dan seluruh kadernya.

Realisasi interaksional ini lebih sering dinyatakan dalam bentuk kalimat interogatif seperti pada kalimat *“sekarang saya bertanya kepada saudara-saudara sekalian apakah saudara-saudara sudah merasa adil, sudah merasa makmur?”* atau seperti pada kalimat *“Ada empat orang Indonesia yang memiliki kekayaan lebih dari seratus juta orang Indonesia yang lain. Apakah ini cita-cita Indonesia?”*. Kedua kalimat tanya tersebut tidak hanya menunjukkan lokusi kebenaran suatu praanggapan—di mana pada kalimat pertama berarti merujuk pada pendekonstruksian konsep adil dan makmur yang selama ini menjadi klaim keberhasilan status quo, sedangkan pada kalimat kedua berarti merujuk pada ironi disparitas antara cita-cita idealis bangsa Indonesia dengan realitas di kehidupan nyata—tetapi juga menggambarkan intensionalitas Prabowo (meminjam taksonomi ilokusi (Searle, 1979, p. 13) dalam bentuk tindak tutur direktif yang cenderung lebih halus) untuk mengajak seluruh audiensi untuk mempertanyakan, merenungkan, serta menelaah kembali praanggapan-praanggapan tersebut.

Mode

Tidak dapat disanggah bahwa wacana pidato ini disampaikan dalam bentuk retorika lisan di atas mimbar kampanye politik; dan karenanya secara otomatis tentunya mengeksplorasi register-register politik di dalamnya. Terkait apakah narasi wacana dituliskan dengan tujuan untuk dibaca secara lantang atau merupakan narasi wacana impromptu yang disampaikan secara spontan, perlu diingat bahwa sosok Prabowo terkenal dengan keautentikannya dalam menyampaikan buah pikirannya langsung dalam bentuk retorika lisan bukan tekstual, meskipun tak jarang juga karena impromptu semacam ini sering menimbulkan banyak polemik di ruang publik. Belum lama hilang dalam ingatan kolektif publik terkait wacananya terkait Indonesia bubar di 2030, terkait *ghost fleet* yang menghantui masa depan bangsa Indonesia.

Sedangkan dari sudut pandang redaksional atau struktur wacananya—merujuk pada *schematic superstructure* (van Dijk & Kintsch, 1983, p. 54) atau *dispositio* dalam istilah Aristoteles (Luhukay, 2007, p. 56)—argumentasi-argumentasi dibangun secara berurutan—baca kembali bagian *field* pada bab sebelumnya—dari pengantar, pernyataan, argumen, dan ditutup dengan epilog. Struktur ini dibangun dari dua jalinan kalimat, yakni deklaratif informatif dan interogatif interaktif, dengan tujuan menyilangkan antara rasionalitas argumentasi di satu sisi dengan unsur simpati empati di sisi lain. Deklaratif informatif

digunakan sebagai sarana menyampaikan proposisi-proposisi sedangkan interogatif interaktif digunakan sebagai sarana menarik perhatian audiensi melalui proses kontemplasi dan refleksi.

Mendudukan kembali Tampang Boyolali pada Konteksnya

Setelah menganalisis secara utuh konfigurasi kontekstual di sekitar ujaran kontroversial *tampang Boyolali*, pada bagian ini kita akan mendudukan kembali ujaran kontroversial tersebut pada konteksnya. Untuk itu, pertama-tama penting untuk menghadirkan bagian kutipan berikut:

Sekarang seharusnya kita pensiun, seharusnya kita istirahat, tetapi kita melihat bahwa negara dan bangsa kita masih dalam **keadaan tidak baik, ekonomi kita tidak di tangan bangsa kita sendiri**. Saya lahir di Jakarta. Saya besar di Jakarta. Saya memberi usia saya untuk untuk bangsa ini, saya memberi jiwa saya dan raga saya untuk bangsa ini. **Tetapi** begitu saya keliling Jakarta saya lihat gedung-gedung mewah, gedung-gedung menjulang tinggi, hotel-hotel mewah, sebut saja hotel mana di dunia yang paling mahal ada di Jakarta. Ada **Ritz-Carlton**, ada apa itu, **Waldoft Astoria**. Namanya saja kalian nggak bisa sebut. Dan macam-macam itu semua, tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Kalian kalau masuk mungkin kalian diusir, **tampang** kalian **tampang** tidak orang kaya, **tampang** kalian, **tampang Boyolali**, ini, **betul?**

Ujaran kontroversial *tampang Boyolali* hanyalah bagian kecil dari wacana besar yang ingin disampaikan oleh Prabowo terkait disparitas ekonomi yang terjadi di Indonesia. Ketimpangan ini dapat terlihat pada begitu banyaknya gedung-gedung mewah, menjulang tinggi, serta hotel mewah kelas dunia; dan hal-hal semacam ini yang menjadikan Prabowo prihatin dan ingin mengabdikan jiwa raganya lebih lama pada bangsa Indonesia. Tentunya pada konteks ini, Prabowo berargumen hanya dengan menjadi presiden di tahun 2019-lah ia bisa memperbaiki segala macam disparitas ini. Titik utama wacananya terletak pada argumentasi tentang disparitas ekonomi dan keinginan atau kehendak Prabowo untuk mengabdikan jiwa raganya melalui kontestasi Capres 2019 guna memperbaikinya. Setelah menyampaikan pembahasan terkait disparitas ini, tentunya Prabowo perlu untuk memberikan beberapa contoh empiris guna mendukung proposisi tersebut, dan salah satunya adalah penyebutan hotel-hotel mewah tersebut, seperti Ritz-Carlton dan Waldoft Astoria. Pemberian bukti-bukti atau contoh ini memang nyatanya terbukti ampuh dalam ilmu retorika untuk menciptakan atau menimbulkan keyakinan (Griffin & McClish, 2000, p. 321).

Di samping penjabaran logis terkait lokus proposisi-proposisi, seorang komunikator yang baik tentunya sangat memahami bahwa hubungan atau ikatan antara dirinya dengan audiensi sangat menentukan, bahkan bisa disebut sebagai kunci utama (*pathos*)—mengingat retorika disampaikan dengan tujuan untuk mendapatkan empati sebanyak mungkin dari para audiensi. Dan Prabowo dalam tataran tertentu sangat memahami hal ini; ia buktikan dengan menarik perhatian para audiensi dengan menggunakan kalimat interogatif interaktif *betul?*. Jadi, dari konteks semacam ini, kita bisa simpulkan secara sederhana bahwa rentetan ujaran kontroversial *tampang Boyolali* ini merupakan sarana yang digunakan Prabowo untuk berinteraksi dengan para audiensi guna mendapatkan perhatian dan simpati mereka terhadap

disparitas ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Lebih lanjut, jika dilihat dari sudut pandang implikatur ujarannya, Prabowo seolah-olah berniat bercanda (*jokes*) dengan seluruh audiensi; alih-alih untuk menghina atau merendahkan martabat mereka dengan menggunakan diksi *tampang Boyolali*. Hal ini terbukti dengan respons yang diberikan oleh audiensi ketika Prabowo melayangkan pertanyaan retorik tersebut. Seluruh audiensi dengan lantang membenarkannya, tanpa ada ungkapan atau ekspresi kekesalan atau kemarahan karena ujaran tersebut. Dari sudut pandang komunikasi politik pun, menjadi sangat tidak masuk akal ketika ada seorang tokoh politik dengan lugas dan terang-terangan menghina atau merendahkan kehormatan para audiensi pendengarnya karena hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip persuasif komunikasi massa; bahwa tujuan utama retorika disampaikan adalah mendapatkan sebanyak mungkin perhatian dan simpati pendengar atau audiensi.

UU No. 19 Tahun 2016

Pasal yang didakwakan kepada Prabowo atas ujaran kontroversial tampang Boyolalinya adalah pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Menimbang unsur-unsur yang tertera dalam pasal tersebut, seperti unsur kesengajaan dan tanpa hak, unsur menyebarkan informasi, unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas SARA, ujaran yang disampaikan Prabowo terbukti tidak memenuhi ketiga unsur tersebut. Prabowo dalam penyampaianya tidak memiliki unsur kesengajaan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan kepada para audiensinya sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Ketika berbicara tentang unsur penyebaran informasi, tentunya hal ini juga dapat dibuktikan bahwa tidak ada sama sekali keinginan Prabowo untuk dengan sengaja menyebarkan ujaran tersebut ke ruang publik. Jadi ketiga unsur pada pasal tersebut sukar untuk dicarikan pembenarannya—mengingat maksud awal Prabowo ketika menyampaikan ujaran tersebut adalah membangun interaksi melalui candaan-candaan (*jokes*) yang dapat diterima oleh seluruh audiensi yang hadir pada saat itu.

Kesimpulan

Penafsiran terhadap bahasa, baik itu berupa ujaran lisan ataupun tulisan, selalu beragam dan berbeda-beda. Layaknya bias cahaya yang diciptakan oleh suatu berlian, yang sangat bergantung pada dari mana kita melihatnya, bahasa juga mampu menghasilkan bias-bias warna (interpretasi) bergantung pada siapa, di mana, untuk keperluan apa, dan dari perspektif seperti apa bahasa tersebut dipandang—terlebih ketika zaman³ membuka lebar ruang untuk terciptanya bias tersebut. Dalam beberapa poin, absolutisme pemaknaan memang menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, seperti komodifikasi tafsir demi kepentingan salah satu pihak, monopoli kebenaran, dan masih banyak yang lainnya. Namun,

bukan berarti penafsiran kebahasaan hanya bisa dilakukan jika konteks ruang di sekitarnya dialpakan. Hal ini pun akan menimbulkan permasalahan yang tak kalah pelik dari permasalahan sebelumnya, misalnya saja fenomena distorsi dan mispersepsi informasi. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kedua pendekatan penafsiran tersebut diletakkan bukan pada ruang oposisi biner (jukstaposisi) namun pada ruang yang saling mengisi satu sama lain.

Jika dari perspektif semantis ujaran kontroversial *tampang Boyolali* masih memiliki celah untuk memunculkan penafsiran yang mengarah pada konotasi negatif, perspektif pragmatis melalui konsep konfigurasi kontekstual menutup (bahkan menolak) celah penafsiran tersebut. Jika makna semantis suatu ujaran selalu mampu menimbulkan bias pemaknaan karena telah dilepaskan dari ruang konteks diucapkannya, maka makna pragmatis, sebaliknya, selalu memiliki penafsiran yang relatif sama tanpa menciptakan bias interpretasi. Dengan mempertimbangkan makna pragmatis dari ujaran tersebut, kita akan sampai pada beberapa kesimpulan, bahwa 1) ujaran kontroversial *tampang Boyolali* tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau menghinakan kehormatan penduduk Boyolali pada umumnya; 2) ujaran tersebut dimaksudkan sebagai sarana humor (*jokes*) untuk menciptakan ruang interaksi antara Prabowo dan seluruh audiensi; dan 3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak memenuhi syarat untuk menjerat ujaran kontroversial tersebut. Meski demikian, sebagai seorang tokoh politik, figur masyarakat, sekaligus orator yang handal, Prabowo seharusnya mampu menangkap konsekuensi-konsekuensi yang akan ditimbulkan ketika menggunakan diksi-diksi yang mudah sekali diasosiasikan dengan SARA—terlebih ketika pesatnya perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan tingkat literasi kritis yang mampu menyeleksi, memilih, dan memilah informasi—sehingga bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan diksi atau register di setiap narasi pidatonya.

Catatan Akhir

1. Wacana yang dibentuk dalam era pos-strukturalisme ini lebih menekankan bahwa suatu ujaran atau gagasan (baik itu ujaran maupun tulisan) tidak memiliki kebenaran absolut sebagaimana yang dipercaya oleh kelompok strukturalisme; bahwa penafsiran terhadap sesuatu itu tidak dapat berhenti pada satu segi saja—meminjam istilah Derrida (Wood, 2009) makna hanya bisa ditunda (*defer – difference*). Dan oleh karena itu, penafsiran jamak (*multiple interpretation*) sangat dimungkinkan untuk menelaah suatu gagasan—sudut pandang semacam ini lebih dikenal dengan konsep dekonstruksi.
2. Unsur retorik ini menurut Aristoteles mencakup tiga hal: 1. Ethos, merujuk pada karakter perilaku penutur; 2. Pathos, merujuk pada peran audiensi pada konteks situasi; dan 3. Logos, merujuk pada cara berpikir atau konstruksi logika dari pesan yang disampaikan (lihat lebih lanjut Murthy, 2014).

3. Zaman di mana pos-strukturalisme dan pos-modernisme mengambil tempatnya. Meminjam argumentasi dari Barthes (1967) dalam esainya yang sangat terkenal *The Death of the Author*, pemaknaan terhadap fenomena bahasa sudah selayaknya dilepaskan dari unsur-unsur kepengarangannya guna menghindari titik absolutisme pemaknaan dan mulai menciptakan ruang-ruang kosong baru untuk mengakomodasi dialektika pemaknaan-pemaknaan alternatif.

Ucapan Terima Kasih

Saya berterima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM-UT) Universitas Terbuka yang telah memberikan hibah penelitian dengan skema penelitian dasar sehingga saya dapat melakukan penelitian ini. Saya juga berterima kasih kepada penyunting dan mitra bestari yang telah berkenan memberikan masukan dan perbaikan atas naskah artikel ini.

Referensi

- Barthes, R. (1967). *The Death of the Author*. In *Image, Music, and Text*. Fontana Press.
- Budiawan, R., & Mualafina, R. F. (2016). Kajian Linguistik Forensik: Kontroversi Tuturan Artis Zaskia Gotik dalam Kasus Penghinaan Lambang Negara. *Seminar Internasional Isu-Isu Mutakhir Dalam Kajian Bahasa Dan Sastra*. 21-22 September 2016.
- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2017). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. Routledge.
- Griffin, E. A., & McClish, G. A. (2000). *A first look at communication theory*. McGraw-Hill.
- Halid, R. (2022). Tindak Tutar Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik. *Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 5(2), 441–458.
- Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1989). *Language, context, and text: Aspects of language in a social-semiotic perspective*. Oxford University Press.
- Kramsch, C., & Widdowson, H. G. (1998). *Language and culture*. Oxford University Press.
- Léon, J. (2007). From Linguistic Events and Restricted Languages to Registers. *Firthian Legacy and Corpus Linguistics. The Henry Sweet Society Bulletin*, 49, 5–26.
- Luhukay, M. S. (2007). Presiden SBY dan politik pencitraan: Analisis teks pidato Presiden SBY dengan pendekatan retorika Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Scriptura*, 1(2), 51–70.
- McMenamin, G. R., & Choi, D. (2002). *Forensic Linguistics Advances in Forensic Stylistics*. CRC Press.
- Mintowati. (2016). Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, 3(2), 197–208.
- Murthy, D. M. L., & Ghosal, M. (2014). A Study on Aristotle's Rhetoric. *Research Journal of English Language and Literature*, 2(4), 249–255.
- Olsson, J., & Luchjenbroers, J. (2014). *Forensic linguistics*. Bloomsbury.
- Paltridge, B. (2012). *Discourse Analysis: An Introduction* (2nd ed.). Bloomsbury.
- Rahman, N. I. Z. (2019). Penggunaan Kata Tabu di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik. *Semiotika*, 20(2), 120–128.
- Searle, J. R. (1979). *Expression and meaning: Studies in the theory of speech acts*. Cambridge University Press.

- Sugono, D., Sugiyono, Maryani, Y., Qodratillah, M. T., Sitanggang, C., Hardaniwati, M., Amalia, D., Santoso, T., Budiwiyanto, A., Darnis, A. D., & Puspita, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Suhandano. (2017). Linguistik Forensik Kesaksian Ilmu Bahasa dalam Sidang Pengadilan. *Seminar Nasional Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 1(1), 20–29.
- van Dijk, T. A., & Kintsch, W. (1983). *Strategies of discourse comprehension*. Academic Press.
- Wisudariani, N. M. R. (2014). Retorika Kampanye Joko Widodo dalam Pilpres 9 Juli 2014 (Sebuah Kajian Aksiologi Filsafat Bahasa). *Prasi: Jurnal Bahasa, Seni, Dan Pengajarannya*, 9(18), 45–51.
- Wood, S. (2009). *Deridda's writing and difference: A reader's guide*. Continuum International Publishing Group Ltd.
- Yule, G. (2020). *The Study of Language* (7th ed.). Cambridge University Press.